

Terdegradasinya otoritas Dewan Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki, 1968-1998

Nur Fadilah Yusuf^{1*}

¹Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, fadilahyusuf023@gmail.com

*¹Corresponding email: fadilahyusuf023@gmail.com

Abstract

In many cases, the struggle for space becomes a contestation that invites academics and the public to see what is happening in it. The Jakarta Arts Council and the local government in Jakarta are a clear example of the struggle for space that took place at Taman Ismail Marzuki. In fact, this arts center was built based on discussions between artists and the governor at that time, but after the change of power, policies also changed so that the adjustment between patron-client experienced adaptations that must be understood in a historical context. This research uses the historical method as a stage to reconstruct historical events in a writing. In the end, through history, we can know what is happening today about the authority of the Jakarta Arts Council at the Jakarta Arts Center Taman Ismail Marzuki is a process of struggle between art and politics in the hegemonic New Order era. Therefore, this article also discusses chronologically the degradation of the authority of the Jakarta Arts Council in Taman Ismail Marzuki caused by several factors such as political policies and governor changes, as well as government bureaucratic intervention in the arts center.

Keywords

Jakarta Arts Council; Taman Ismail Marzuki; arts center; new order

Abstrak

Dalam banyak kasus, perebutan ruang menjadi satu kontestasi yang mengajak kaum akademisi dan masyarakat untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Dewan Kesenian Jakarta dan pemerintah daerah di Jakarta adalah contoh nyata terkait dengan perebutan ruang yang terjadi di Taman Ismail Marzuki. Padahal, pusat kesenian ini, dibangun atas diskusi antara para seniman dengan gubernur waktu itu, tetapi setelah pergantian kekuasaan, kebijakan juga ikut berganti sehingga penyesuaian antara patron-klien mengalami adaptasi yang harus dipahami dalam konteks sejarah. Penelitian ini menggunakan metode sejarah sebagai tahapan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah dalam sebuah tulisan. Pada akhirnya, melalui sejarah, kita dapat mengetahui apa yang terjadi hari ini tentang otoritas Dewan Kesenian Jakarta di Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki adalah proses pergulatan antara seni dan politik pada era Orde Baru yang menghegemoni. Maka dari itu, artikel ini juga membahas secara kronologi terkait dengan terdegradasinya otoritas Dewan Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti politik kebijakan dan pergantian gubernur, serta intervensi birokrasi pemerintahan di pusat kesenian.

Kata kunci

Dewan Kesenian Jakarta; Taman Ismail Marzuki; pusat kesenian; orde baru

**Received: Januari 31st, 2024*

**Accepted: April 29th, 2024*

**Revised: April 8th, 2024*

**Published: April 30th, 2024*

PENDAHULUAN

Revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang dilakukan melalui kerja sama dengan PT. Jakarta Propertindo atau Jakpro sejak 2019 lalu menuai pro-kontra di dalam seniman itu sendiri. Hal ini berdampak pula terhadap otonomi seni di Taman Ismail Marzuki yang selama ini dipegang oleh dinas kebudayaan dan Dewan Kesenian Jakarta. Problem tersebut tentunya menyebabkan masuknya Jakpro sebagai pengelola baru di kompleks Taman Ismail Marzuki sehingga secara tidak langsung mengakibatkan Dewan Kesenian Jakarta tergerus eksistensinya sebagai tuan rumah. Jika kita melihat sejarahnya, Taman Ismail Marzuki adalah proyek pertama Dewan Kesenian Jakarta dan Ali Sadikin waktu itu (Jones, 2015). Namun, kendali pemerintah di Taman Ismail Marzuki saat ini bukanlah hal baru, terdapat perubahan yang terjadi secara perlahan dalam tata kelola penguasaan pusat kesenian tersebut. Berangkat dari karya Tod Jones (2015) yang meneliti mengenai relasi kebudayaan dengan kekuasaan sehingga memunculkan suatu jawaban tentang penguasaan pusat kesenian oleh pemerintah melalui kuasa politik yang diterapkannya.

Tod Jones membahasnya dari perspektif relasi kuasa yang memberikan fokus terhadap kajian patrimonialisme. Peristiwa ini sangat tergambar dengan jelas dari kondisi relasi antara patron-klien di Asia Tenggara. Ini seperti yang diteliti juga oleh Angus McIntyre yang menggambarkan relasi kuasa terjadi juga di Indonesia, dimana sang patron akan bertindak sebagai penguasa tradisional yang terstruktur secara vertikal sehingga pola kekuasaan era Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kekuasaan Jawa yang cenderung patrimonial (McIntyre, 1990; Jones, 2015). Patrimonialisme dalam pembahasan lainnya memiliki makna pembaruan atau perbaikan dari tatanan kehidupan yang telah terpolarisasi pasca Perang Dunia II. Maka model politik yang diterapkan saat itu adalah liberalis-imperialisme komparatif sehingga hanya berfokus pada kaum elite (Berger, 1997).

Kembali pada persoalan hilangnya otoritas Dewan Kesenian Jakarta yang terjadi secara perlahan adalah bentuk kenyataan bahwa politik pada saat itu sebenarnya mencari keuntungan semata. Para seniman yang awalnya muncul sebagai pendukung rezim, kemudian berubah menjadi kelompok oposisi dengan menggunakan ruang yang diciptakan melalui kekuasaan pemerintah. Polarisasi memang terjadi di dalam ruang publik, sehingga menjadikan kontestasi yang tidak disengaja atau sengaja dibentuk untuk memunculkan perhatian dari orang di luar kelompoknya (Denisoff, 1966). Kajian ini adalah bagian dari sejarah sosial. Karena fokusnya pada institusi dan apa yang terjadi pada institusi itu (Kuntowijoyo, 2013b).

Pembangunan Taman Ismail Marzuki sebagai pusat kesenian, memiliki historisitas penting dalam pergolakan politik kebudayaan yang terjadi pada era Demokrasi Terpimpin, terutama menjelang tahun 1965, perdebatan kebudayaan antara

Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra dengan Manifestasi Kebudayaan atau Manikebu menjadi topik hangat di beberapa media cetak kala itu. Kenyataannya, rezim politik waktu itu ikut campur tangan di dalam persoalan terkait Lekra dan Manikebu (Supartono, 2000). Berangkat dari konteks historis itu yang akhirnya membuat Dewan Kesenian Jakarta juga terdampak kekuatan rezim. Penelitian tentang Taman Ismail Marzuki ataupun Dewan Kesenian Jakarta sebenarnya telah ditulis oleh beberapa peneliti, sehingga sangat penting bagi penulis untuk membahasnya dan mengacu pada rujukan terdahulu sebagai pola berpikir dalam merekonstruksinya.

Niken Flora Rinjani membahas Taman Ismail Marzuki melalui perubahan yang terjadi sehingga menyebabkan perubahan juga terhadap perilaku para seniman di Taman Ismail Marzuki (Rinjani, 2020). Citra Smara Dewi dalam karyanya juga memberi pembahasan tentang peran Taman Ismail Marzuki sebagai pameran seni rupa kontemporer pada periode Orde Baru (Dewi, 2017). Disertasi dari Achmad Syaeful Anwar membahasnya peran penggerak seni di Taman Ismail Marzuki dalam konteks teater sehingga kemunculan seni sastra ini sangat memberikan pengaruh terhadap seniman dan Tesis dari Rr. Mega Trianasari tentang yang membahas mengenai peristiwa Desember Hitam menjadi penting juga bagi penulis untuk dirujuk sehingga memperlihatkan dinamika politik kesenian terjadi di Dewan Kesenian Jakarta (Anwar, 2012; Trianasari, 2019). Pemaparan tinjauan terdahulu yang telah disebutkan oleh penulis, tidak ada satupun yang berfokus pada Dewan Kesenian Jakarta terutama terkait dengan hilangnya otoritas di Taman Ismail Marzuki. Menurut hemat penulis, karya dari Niken Flora Rinjani yang hampir mendekati terkait dengan artikel ini.

Berangkat dari tinjauan karya terdahulu itu, penulis memiliki rumusan masalah utama yang akan dibahas secara bertahap di bagian pembahasan. Pertanyaan utama yang diajukan oleh penulis dalam artikel ini yaitu: mengapa negara ingin menguasai pusat kesenian dan seniman? Pertanyaan itu menjadi penting bagi penulis untuk melihat konteks hari ini yang menyebabkan hilangnya otonomi Dewan Kesenian Jakarta dalam pengelolaannya di Taman Ismail Marzuki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah sebagai tahapan dari rekonstruksi artikel ini. Adapun tahapan yang dilakukan oleh penulis antara lain, heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013a). Dalam implementasinya, penulis mengumpulkan beberapa referensi sejenis yang dinilai dapat dijadikan sebagai sumber untuk penelitian ini. Penulis menggunakan majalah seperti *Horison*, *Prisma*, dan *Budaja Djaja* untuk melihat konteks peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kemudian surat kabar seperti *Kompas* dan *Sinar Harapan* juga tidak lepas dari rujukan penulis. Terakhir, penulis juga menggunakan artikel dan buku sejenis atau yang memiliki keterkaitan dengan artikel yang penulis bahas serta sumber pendukung dari wawancara terhadap beberapa narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Kesenian Jakarta dan Taman Ismail Marzuki

Sebelum membahas mengenai kontestasi yang terjadi di Taman Ismail Marzuki, tentunya kita harus membahas terlebih dahulu bagaimana ruang ini diciptakan dan oleh siapa yang berkepentingan di dalamnya. Hadimadja (2012) dan Rosidi (2006) dalam karyanya telah mengulas pembangunan Taman Ismail Marzuki dan pembentukan Dewan Kesenian Jakarta sebagai pemegang otoritas kesenian di Taman Ismail Marzuki. Keberadaan Ali Sadikin yang menginginkan dibangunnya pusat kesenian untuk menampung aktivitas para seniman di Jakarta, sehingga Ajip Rosidi, Ramadhan KH dan Ilen Surianegara adalah penyambung dari para seniman dalam merealisasikan pembangunan pusat kesenian (Manua, 2023).

Sebelum membentuk pusat kesenian, diskusi yang dilakukan oleh para seniman waktu itu terkait dengan ideologi yang diterapkan di pusat kesenian. Hal ini didasari oleh peristiwa yang terjadi sebelum 1965 terkait dengan dinamika politik kebudayaan antara Lekra dan Manikebu. Oleh karena itu, pembahasan ini menjadi penting dilakukan, khususnya dalam jangka panjangnya terkait persoalan pusat kesenian di Jakarta. Humanisme Universal adalah kesepakatan yang terbentuk di kompleks pusat kesenian, baik Dewan Kesenian Jakarta maupun Taman Ismail Marzuki (Jones, 2015). Ideologi tersebut menjadi suatu kepentingan antara seniman dan Ali Sadikin yang waktu itu memang menghindari terjadinya peristiwa serupa. Mengutip pemberitaan Kompas, dibentuk organisasi yang bertanggungjawab atas kegiatan seni di pusat kesenian dan disahkan oleh Ali Sadikin serta menunjuk Trisno Sumardjo sebagai ketua pertamanya (Kompas, 5 November 1968).

Setelah Dewan Kesenian Jakarta terbentuk, diskusi selanjutnya mengenai pusat kesenian yang terkonsep pada kebebasan. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh hilangnya spasialitas seniman yang menjadikan Senen sebagai tempat mereka dan kemudian dipindah ke Cikini (Biran, 2016; Yusuf, 2023b). Terutama dalam penciptaan pemikiran yang terintegrasikan pada kebudayaan modern (Nas, 1992). Larry R. Ford dalam tulisannya memberi penjelasan mengenai konsep ruang yang bebas seperti halnya Pasar Gambir untuk kepentingan sosialisasi budaya (Ford, 1993). Purnawan Basundoro juga menambahkan salah satu ciri kota di Jawa ditandai dengan adanya alun-alun atau dapat dikaitkan dengan ruang publik yang menjadi ruang pertemuan masyarakat dari berbagai kalangan (Basundoro, 2015). Konsep itulah yang kemudian menjadi gambaran umum dari Taman Ismail Marzuki sehingga ruang kebebasan ini merupakan kebudayaan modern yang tercipta oleh realitas sosio-politik dan kebijakan budaya saat itu (Jones, 2012).

Dalam pendiskusiannya, para anggota Dewan Kesenian Jakarta menyetujui keinginan Ali Sadikin untuk membebaskan pusat kesenian ini dari kepentingan politik praktis. Hal itu terlihat dari pidato Ali Sadikin saat peresmian Taman Ismail Marzuki

pada 10 November 1968 (Kompas, 11 November 1968), tetapi Goenawan Mohamad justru mempertanyakan sikap dari Ali Sadikin yang ingin menjauhkan pusat kesenian itu dari kepentingan politik yaitu adakah pesanan dari penguasa terhadap kegiatan seni atau subversif terhadap kekuasaan (Majalah Horison, 1977). Meskipun Goenawan Mohamad mempertanyakan hal itu, Sony Karsono dalam artikelnya justru mendukung bahwa sebaiknya seni dan politik itu tidak perlu disatukan. Sebab, Taman Ismail Marzuki tercipta dengan prinsip seni untuk seni (Karsono, 2022). Graciela Schuster dan Mariana Ortega Breña melakukan komparasi terkait dengan pro dan kontra terhadap pernyataan Ali Sadikin yaitu fenomena ini merupakan permasalahan yang pasti terjadi di dalam dinamika seniman, sehingga kegiatan yang awalnya sebagai bentuk hiburan kepada masyarakat, tetapi berubah menjadi mobilisasi massa yang terpengaruh dengan karya para seniman untuk melawan elit atau pemerintah, sehingga tidak jarang antara seni dan politik menemukan konfrontasinya dalam satu waktu (Schuster & Breña, 2015).



Gambar 1. Kompleks Taman Ismail Marzuki

Sumber: Ajip Rosidi, 1974

Gambar tersebut adalah pusat kesenian yang menjadi sebuah hunian penting bagi para seniman dalam penciptaan karya. Akan tetapi, sebagai pusat kesenian yang menginginkan kebebasan, Ali Sadikin melarang segala aktivitas politik di Taman Ismail Marzuki sebagaimana yang dijelaskan oleh Abuhasan Asyari sekretaris Akademi Jakarta (Asy'ari, 2024). Intervensi pemerintah terhadap para seniman di Taman Ismail Marzuki baru terasa setelah Ali Sadikin tidak lagi menjabat sebagai gubernur. Mengutip dari pemberitaan Kompas, pada saat Rendra menampilkan teaternya yang bersifat kritik, menyebabkan pemerintah mengambil tindakan represif terhadap pementasan Rendra (Kompas, 28 April 1978).

Pusat kesenian tak jarang dianggap sebagai pelokalisiran para seniman terutama dalam tugas pemerintah untuk mengontrol setiap pergerakan yang dianggap menuai kontroversi bagi pemerintah, ini sebagai fenomena umum yang terjadi di ruang publik (Burke, 2015). Selain itu, intervensi tersebut, memang kerap lahir dari pusat kesenian karena dinilai sebagai bentuk pengaruh dari realitas sosio-politik yang terjadi di pusat

kesenian (Madjalah Budaja Djaja, 1978). Meskipun Dewan Kesenian Jakarta menjadi tuan rumah dalam hal kegiatan seni, organisasi ini hanya bertugas sebagai *screening* bagi para seniman yang ingin tampil di Taman Ismail Marzuki (Usman, 2023) dan Dewan Kesenian Jakarta memberikan konsekuensi terhadap seniman itu sendiri bila penampilannya kerap menuai kontroversi (Manua, 2023). Dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan humanisme universal yang diterapkan di Taman Ismail Marzuki oleh Dewan Kesenian Jakarta adalah bentuk kebebasan yang konsekuensinya ditanggung oleh pribadi masing-masing.

Politik Kebijakan dan Pergantian Gubernur

Pada awal pembentukannya, Dewan Kesenian Jakarta memiliki tugasnya sebagai *screening* atau penyaringan karya seni yang akan ditampilkan di Taman Ismail Marzuki. Kebijakan tersebut, bukan berarti menjadi kepentingan politis Dewan Kesenian Jakarta, melainkan penerapan politik kebebasan dalam mengimplementasikan humanisme universal di pusat kesenian tersebut. Hal itu menjadi pola interaksi di pusat kesenian yang menyebabkan adanya relasi di dalamnya dan Panos D. Bardis menekankan bahwa interaksi tersebut meliputi diskusi dan seni sehingga munculnya intensitas dari komunikasi yang terjadi secara berkala (Bardis, 1979; Kaplan, 1960). Mengenai politik kebijakan yang dilakukan Dewan Kesenian Jakarta, hal itu adalah bentuk implementasi aktif dan langsung dari Ali Sadikin untuk menghindari intervensi politik pemerintah di Taman Ismail Marzuki (Karsono, 2022).

Penerapan politik kebijakan itu menandakan bahwa seni dapat menjadi sebuah relasi kuasa yang memberikan keuntungan bagi golongan tertentu (Yusuf, 2023a). Barangkali peristiwa Desember Hitam adalah salah satunya yang berdampak cukup penting dalam dunia seni rupa (Dewi, 2017; Trianasari, 2019). Selain itu, politik kebijakan Ali Sadikin sepertinya menjadi sebuah pedoman utama bagi Dewan Kesenian Jakarta untuk memberikan suatu gambaran yang cukup bebas dalam berekspresi di Taman Ismail Marzuki (Rinjani, 2020). Permasalahan yang terjadi di pusat kesenian itu secara perlahan muncul pasca pergantian gubernur, terutama saat dana bantuan untuk operasional kesenian mengalami stagnansi. Kebijakan lainnya adalah perekrutan karyawan Taman Ismail Marzuki yang sebelumnya berada di bawah Dewan Kesenian Jakarta kemudian beralih di bawah kendali Dinas Kebudayaan (Asy'ari, 2024), menurut catatan dari Jose Rizal Manua, perekrutan karyawan menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS dengan alasan penghematan dana pemerintah (Manua, 2010). Perekrutan tersebut, memang menjadi sebuah solusi konkret yang pada waktu itu dilakukan untuk menekan anggaran kesenian dan menjadi satu pintu bagi anggaran pemerintah daerah.

Abuhasan Asyari, selaku Akademi Jakarta tentu menjelaskan bahwa kebijakan tersebut memang menyebabkan pengurangan otoritas Dewan Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki (Asy'ari, 2024). Intervensi tersebut menjadi semakin masif saat memasuki periode 1980, saat Taman Ismail Marzuki mendirikan bioskop dan didirikannya kios yang dinilai menjadi sisi komersil (Barker, 2000; Jones, 2015; Rinjani,

2020). Pergantian gubernur dari Ali Sadikin ke Tjokropranolo memang dinilai menjadi permasalahan yang menyebabkan terdegradasinya otoritas Dewan Kesenian Jakarta dari Taman Ismail Marzuki. Barker menyebut bahwa fenomena itu adalah ketidakmampuan pemerintah dalam hal pendanaan operasional untuk urusan kesenian (Barker, 2000). Akibat ketidakmampuan itu, akan muncul tuduhan terhadap kelompok-kelompok yang dinilai berpotensi untuk dikambinghitamkan sebagai jawaban atas permasalahan ini.

Permasalahan kios-kios itu menjadi konteks penting bagi Taman Ismail Marzuki yang mengubah wajah pusat kesenian menjadi pasar (Kompas, 12 Agustus 1983). Meski demikian, kemerosotan tersebut memang tidak dapat dihindari. Selain secara perlahan Dewan Kesenian Jakarta kehilangan kendali atas Taman Ismail Marzuki, permasalahan dana menjadi salah satu yang dijadikan sebagai penguat masuknya intervensi pemerintah. Pada periode 1980-1990, renggangnya relasi Dewan Kesenian Jakarta dengan pemerintah daerah menyebabkan hilangnya kendali atas manajemen (Jones, 2015). Barangkali, pertanyaan Goenawan Mohamad yang sempat terekspos dalam Majalah Horison telah terjawab di dalam pergantian kekuasaan ini, terkait dengan politik tidak boleh masuk ke dalam pusat kesenian. Van Peursen dalam Strategi Kebudayaan menganggap permasalahan ini adalah suatu fenomena kebudayaan yang dilembagakan, karena dianggap perlu untuk diintervensi, sedangkan Ali Moertopo juga menuliskan bahwa Orde Baru adalah proses pembudayaan yang sebenarnya bermakna ambiguitas (Moertopo, 1974; Peursen, 1976). Artinya, rezim ini juga memiliki peran sebagai pembentuk kebudayaan (Moertopo, 1974).

Pada tahun 1980, ekonomi secara nasional memang cenderung menguat, sehingga Orde Baru memerlukan organisasi kesenian atau kebudayaan dalam memperkuat stabilitasnya di kalangan masyarakat sehingga perlu untuk membentuk Taman Ismail Marzuki dan Dewan Kesenian Jakarta sebagai versi tertentu yang dipertunjukkan (Hill, 1993; Jones, 2012). Meskipun pada waktu Ali Sadikin masih menjabat, Dewan Kesenian Jakarta memang tunduk terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Ali Sadikin dalam hal kebudayaan. Akan tetapi, saat Tjokropranolo menjabat, ketegangan ini mulai terlihat, terutama saat otoritas Dewan Kesenian Jakarta mulai dikurangi oleh pemerintah (Hill, 1993; Jones, 2015). Barangkali, Foucault cukup benar dalam tulisannya bahwa dominasi dari kekuasaan menjadi satu hambatan yang mengakar kuat bagi keberlanjutan perkembangan kegiatan dan sebenarnya juga sebagai titik balik dari strategi perlawanan bagi kelompok sosial (Foucault, 1980).

Tulisan Thee Kian Wie yang membahas tentang ekonomi Indonesia pada zaman Orde Baru adalah bentuk keberhasilan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai keajaiban di Asia (Wie, 2007) dan menggambarkan bahwa Soekarno dalam rezim Demokrasi Terpimpin serta partai pendukungnya waktu itu (lebih tertuju ke PKI) adalah satu kenyataan penting yang membuat hancurnya demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, perlunya kelompok teknokrasi untuk memperkuat lagi stabilitas nasional (Majalah Prisma, 1984). Itulah yang pada akhirnya menyebabkan proses berkuasanya

militer dalam politik Orde Baru dan proses pembudayaan yang dimaksud oleh Ali Moertopo (Moertopo, 1974; Majalah Prisma, 1988).

Kembali ke persoalan otoritas Dewan Kesenian Jakarta. Setidaknya, permasalahan itu menjadi penyebab secara perlahan bahwa intervensi pemerintah ke Taman Ismail Marzuki dilakukan secara kelompok maupun individu. Tod Jones juga menegaskan dalam artikelnya bahwa Orde Baru tampil sebagai pemerintahan yang mengikuti model Hindia Belanda, salah satunya adalah kontrol penuh terhadap organisasi yang dinilai progresif (Jones, 2012). Pertanyaan besar semakin bermunculan, ketika pemerintah mendominasi secara keseluruhan ruang di masyarakat, termasuk dengan kebijakan yang mengatasmamakan Pancasila. Kebijakan-kebijakan yang kemudian diterapkan secara *top-down* adalah suatu keharusan bagi warga negara untuk berpartisipasi di dalamnya, tidak terkecuali Dewan Kesenian Jakarta (Hill, 1993). Minimnya ruang demokrasi menyebabkan kemandekan terhadap keberlangsungan aktivitas di berbagai bidang, salah satunya kebudayaan (Bourchier, 1998)

Hilangnya Otoritas dan Berakhirnya Rezim

Bagi pemerintah Orde Baru, penguasa di tingkat regional adalah perpanjangan tangan sehingga penerapan budaya satu komando menjadi sebuah pertunjukkan politik kebudayaan. Pembentukan budaya adalah satu kunci bagi rezim Orde Baru untuk mengelola negara yang beragam sehingga pembuatan miniatur Taman Mini Indonesia Indah menjadi salah satu bukti dari keseriusan pemerintah dalam menguasai kebudayaan (Jones, 2012; Moertopo, 1974). Semakin terlihat keinginan untuk menggeser Dewan Kesenian Jakarta saat dibentuknya Yayasan Kesenian Jakarta pada 22 Agustus 1989 oleh Gubernur Wiyogo Atmodarminto (Alisjahbana, et.al., 1993; Rinjani, 2020). Yayasan ini menjadi potensi penting bagi pemerintah daerah dalam mencari pendanaan dari swasta sehingga sangat kentara kebijakan pemerintah dalam menghilangkan otoritas Dewan Kesenian Jakarta sebagai tuan rumah Taman Ismail Marzuki (Murgiyanto, 1994). Jika ditelusuri kembali, kebijakan ini dilakukan untuk menghapus warisan kebijakan Ali Sadikin di Taman Ismail Marzuki sebagaimana dekonstruktif kebijakan politik sebelumnya (Acciaioli, 1985).

Selain itu, untuk menguasai pusat kesenian, program revitalisasi pertama Taman Ismail Marzuki diterapkan. Menurut Rinjani, program tersebut tidak melibatkan seniman atau Dewan Kesenian Jakarta dalam revitalisasi itu (Rinjani, 2020). Kebijakan tersebut menjadi jelas terkait dengan upaya penyingkiran Dewan Kesenian Jakarta yang kemudian menjadi simbolisasi semata dalam organisasi seni di Jakarta. Hegemoni itu yang kemudian menjadi benang merah penting bagi tulisan Adrian Vickers untuk mengetahui pertunjukkan kebijakan budaya dalam dominasi pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap intervensi yang dilakukan secara terbuka (Vickers, 1997). Keterlibatan pemerintah dalam hegemoni terhadap keseluruhan elemen bangsa adalah

satu kenyataan, tidak hanya melalui ruang publiknya, tetapi juga organisasi (Aulia, 2016; Gunn, 1979).

Kembali pada program revitalisasi pertama, pelaksanaannya terlihat sejak tahun 1991 dan selesai tahun 1996, beberapa bangunan yang terkena revitalisasi antara lain, Teater Terbuka, Teater Tertutup, Wisma Seni, Ruang Pameran dan Rumah Karyawan (Rinjani, 2020). Keterlibatan pendanaan dari pihak swasta sebenarnya menjadi suatu kepiluan terhadap dunia kesenian di Indonesia, khususnya di Jakarta, secara langsung menjelaskan bahwa revitalisasi itu bermakna utang yang harus dibayarkan, seperti halnya kondisi hari ini saat Jakpro melakukan revitalisasinya yang menyebabkan Dewan Kesenian Jakarta terus terlempar dari Taman Ismail Marzuki. Pada peringatan 27 Tahun Taman Ismail Marzuki, pembenahan organisasi menjadi relevansi yang terdiskusikan bagi para seniman (Sinar Harapan, 11 November 1995). Hilangnya otoritas Dewan Kesenian Jakarta juga berdampak terhadap sulitnya pementasan yang dinilai kritik terhadap pemerintah, seperti halnya Rendra yang tidak dapat izin pada kegiatannya (Kompas, 9 November 1990) dan Forum Demokrasi yang juga mendapatkan hal yang sama (Kompas, 20 April 1992). Orde Baru tentu menyadari bahwa munculnya kekuatan dari kalangan lain di masyarakat adalah satu bukti bahwa keinginan untuk melakukan perubahan tidak hanya diinginkan oleh satu atau dua kelompok.

Dewan Kesenian Jakarta juga ambil bagian, meskipun sebenarnya kelompok ini telah banyak kehilangan otoritasnya di Taman Ismail Marzuki selama kekuasaan Orde Baru, tetapi kelompok ini tentunya mengharapkan bahwa otoritas itu dapat kembali sepenuhnya. Terlebih lagi bahwa, tidak adanya campur tangan dari pemerintah atau dapat menjadi kolaboratif dalam hal pengelolaan menjadi sebuah keinginan penting bagi para seniman untuk dapat mengatur sebuah pusat kesenian. Kebijakan tersebut sangat kontras terutama saat para seniman melakukan penampilannya di Taman Ismail Marzuki, seni yang sebelumnya terpaku hanya untuk seni, kemudian berubah menjadi kritik terhadap pemerintah. Humanisme Universal tampaknya telah beralih menjadi Realisme Sosial yang mengemban penyelarasan terhadap kebebasan. Kebebasan tersebut, kemudian berubah sebagai kepentingan sosial terhadap keseimbangan demokrasi (Jones, 2015). Di bagian ini, seni memang mengalihkan geraknya menjadi sebuah perlawanan secara masif dan berupaya dalam mencari dukungan dari pihak luar kelompoknya (Denisoff, 1966; Yusuf, 2023a). Realitasnya adalah pada saat menjelang reformasi, diskusi adalah satu usaha konkret yang terlihat cukup progresif. Meskipun sebenarnya, para peserta memerlukan ruang, tetapi, di kompleks Taman Ismail Marzuki, tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.

Dewan Kesenian Jakarta masih memiliki otoritas dalam penentuan seni pertunjukkan, walaupun tidak sepenuhnya dipegang olehnya. Dinas Kebudayaan merasa reorganisasi birokrasi adalah jalan konkret dalam memberikan lagi otoritasnya pada Dewan Kesenian Jakarta, tetapi sebenarnya itu hanya kebijakan formalitas belaka. Beberapa kali penampilan seni di Taman Ismail Marzuki, realitas yang terjadi adanya

penjagaan dari aparaturnegara, seperti militer dan polisi, terutama menjelang agenda reformasi. Sebagai ruang publik, Taman Ismail Marzuki menjadi lahan kontestasi antara negara dengan sipil pada waktu itu (Burke, 2015). Seniman mengajak para demonstran untuk mengikuti alurnya melalui karya untuk memberikan kontribusinya terhadap perubahan secara bertahap (Yusuf, 2023a).

Agenda reformasi itu semakin kentara saat situasi di Jakarta sudah mulai menampakkan beberapa demonstrasi di jalan-jalan protokol, para seniman yang diantaranya Rendra, Taufiq Ismail, Jose Rizal dan Dewan Kesenian Jakarta memusatkan kegiatannya di Taman Ismail Marzuki. Tujuannya adalah sebagai bentuk solidaritas juga terhadap perubahan yang menjadi sebuah keinginan bersama terhadap kepentingan nasional (Majalah Horison, 1998). Di samping itu, penampilan teater dan puisi menunjukkan kenyataan bahwa para seniman sepenuhnya mendukung aksi para mahasiswa yang melakukan demonstrasi di Gedung Parlemen Kompas, 21 Mei 1998). Para seniman mempertunjukkan karya mereka di Taman Ismail Marzuki seperti Taufiq Ismail, dan Rendra sebagai kritik terhadap kekuatan rezim.

BAYI LAHIR BULAN MEI 1998

*Dengarkan itu ada bayi mengea di rumah tetangga
Suaranya keras, menangis berhiba-hiba
Begitu lahir ditating tangan bidannya
Belum kering darah dan air ketubannya
Langsung memikul hutang di bahunya, rupiah sepuluh juta*

.....

Sumber: karya Taufiq Ismail, Majalah Horison, Juni 1998

SAJAK BULAN MEI 1998 DI INDONESIA

*Aku tulis sajak ini di bulan gelap raja-raja
Bangkai-bangkai tergeletak lengket di aspal jalan
Amarah merajalela tanpa Alamat
Ketakutan muncul dari sampah kehidupan*

.....

Sumber: karya Rendra, Majalah Horison, Juni 1998

Beberapa karya di atas menjadi narasi penting dalam sejarah para seniman di Indonesia pada akhir era Orde Baru. Mereka terlihat beriringan dengan para demonstran untuk mencapai perubahan. Taman Ismail Marzuki yang masih dijaga ketat oleh beberapa alat negara, tidak luput dari kritik para seniman. Meskipun, penampilan tersebut sempat mendapat pelarangan, tetapi melihat situasi yang tidak kondusif di Jakarta, pengelola Taman Ismail Marzuki memberi keleluasaan terhadap kepentingan para seniman. Maka, pada saat para mahasiswa berhasil mendesak Soeharto mundur dari jabatannya, kebebasan juga terasa bagi para seniman yang ingin tampil di Taman

Ismail Marzuki. Meskipun sebenarnya, Dewan Kesenian Jakarta tidak mendapat haknya dalam mengelola pusat kesenian tersebut, dikarenakan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta mengambil alih pengelolaannya sejak dekade 1980.

KESIMPULAN

Antara Dewan Kesenian Jakarta dan Taman Ismail Marzuki dapat kita asumsikan sebagai dua kutub yang tidak terpisahkan, tetapi melihat fenomena yang mengakibatkan hilangnya otoritas Dewan Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki agaknya dapat disimpulkan melalui beberapa pendapat yang penulis berikan seperti pergantian gubernur, politik kebijakan dan kebudayaan. Ketiga alasan itu yang menyebabkan Dewan Kesenian Jakarta harus kehilangan otoritasnya di Taman Ismail Marzuki, tentu saja ini menjadi sebuah kemungkinan bagi pemerintah untuk mengintervensi pusat kesenian dan mengendalikan para aktor yang ada di dalamnya. Itulah yang menyebabkan mengapa negara harus menguasai kebudayaan dan mengendalikannya, sehingga mereka dapat menjalankan program politiknya melalui budaya satu komando.

DAFTAR RUJUKAN

- Acciaoli, G. (1985). Culture as Art: From Practice to Spectacle in Indonesia. *Canberra Anthropology*, 8(1), 148–172.
- Alisjahbana, et. al. (1993). *Pusat Kesenian Jakarta : Taman Ismail Marzuki = The Jakarta Arts Center*. Yayasan Kesenian Jakarta.
- Anwar, A. S. (2012). *Perkembangan Teater Kontemporer Indonesia 1968-2008*. Universitas Indonesia.
- Asy'ari, A. *Wawancara Pribadi*. 25 Januari, 2024
- Aulia, D. (2016). Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 115–126. <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.362>
- Bardis, P. D. (1979). Social Interaction and Social Processes. *Social Science*, 54(3), 147–167. <https://www.jstor.org/stable/41886414>
- Barker, C. (2000). *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Bentang Pustaka.
- Basundoro, P. (2015). The Two Alun-alun of Malang 1930-1960. In *Cars, Conduits, and Kampongs: The Modernization of the Indonesian City, 1920-1960*. Brill.
- Berger, M. T. (1997). Old State and New Empire in Indonesia: Debating the Rise and Decline of Suharto's New Order. *Third World Quarterly*, 18(2), 321–361. <https://www.jstor.org/stable/3993226>
- Bourchier, D. (1998). Indonesianising Indonesia: Conservative Indegenism in an age of Globalisation. *Social Semiotics*, 8(2–3), 203–214. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10350339809360408?casa_tok

- en=V29REvAeh_gAAAAA:GCuv7ZsyPpoewbm3g_Ie-VmEn0JTzm4z19-kV2ZHp1U2VeLvn3mvf8xA8WZqAoKR26vMO_dpQNjJLUloSA
- Burke, P. (2015). *Sejarah dan Teori Sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Biran, M.Y. (2016). *Keajaiban di Pasar Senen*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Denisoff, R. S. (1966). Songs of Persuasion: A Sociological Analysis of Urban Propaganda Songs. *The Journal of American Folklore*, 79(314), 581–589. <https://doi.org/10.2307/538223>
- Dewi, C. S. (2017). Peran Taman Ismail Marzuki Terhadap Perkembangan Seni Rupa Kontemporer Indonesia: Kajian Peristiwa Pameran Seni Rupa era 1970-an. *Jurnal Seni Nasional Cikini*, 2(2), 7–17. <https://doi.org/10.52969/jsnc.v2i2.51>
- Ford, L. R. (1993). A Model of Indonesian City Structure. *Geographical Review*, 83 (4), 374–396. <https://doi.org/10.2307/215821>
- Foucault, M. (1980). Truth and Power. In *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. Harvester Press.
- Gunn, G. C. (1979). Ideology and the Concept of Government in the Indonesian New Order. *Asian Survey*, 19(8), 751–769. <https://doi.org/10.2307/2643719>
- Hadimadja, R. K. (2012). *Ali Sadikin: Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi*. Ufuk Press.
- Hill, D. T. (1993). The Two Leading Institutions': Taman Ismail Marzuki and Horison. In *Culture and Society in New Order Indonesia*. Oxford University Press.
- Jones, T. (2012). Indonesian Cultural Policy in the Reform Era. *Indonesia*, 93, 147–176. <https://www.jstor.org/stable/10.5728/indonesia.93.0147>
- Jones, T. (2015). *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad ke-20 hingga era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kaplan, H. B. (1960). The Concept of Institution: A Review, Evaluation and Suggested Research Procedure. *Social Forces*, 39(2), 176–180. <https://www.jstor.org/stable/2574158>
- Karsono, S. (2022). The City, the Body and the World of Things. *Bijdragen Tot de Taal-, En Volkenkunde*, 178(2), 192–224. <https://www.jstor.org/stable/48673678>
- Kompas. (1968a, June 5). Pengurus Harian Dewan Kesenian DCI Djaya.
- Kompas. (1968b, November 11). Taman "Ismail Marzuki" Diresmikan.
- Kompas. (1978, April 28). Pembacaan Sajak Rendra.
- Kompas. (1983, August 12). Pasar dan Bukan Pasar Apa Bedanya.
- Kompas. (1990, November 9). WS. Rendra: Izin pembacaan puisi tak kunjung keluar.
- Kompas. (1992, April 20). Forum Demokrasi.
- Kompas. (1998, May 21). Seniman Dukung Pak Harto Turun.
- Kuntowijoyo. (2013a). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana.

- Kuntowijoyo. (2013b). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Manua, J. R. (2010). *Catatan Pribadi*.
- Manua, J. R. *Wawancara Pribadi*. 23 Desember, 2023.
- McIntyre, A. (1972). Divisions and Power in the Indonesian National Party, 1965-1966. *Indonesia*, 13, 183–210. <https://doi.org/10.2307/3350686>
- Moertopo, A. (1974). *Strategi Kebudayaan*. Yayasan Proklamasi CSIS.
- Murgiyanto, S. (1994). Perjalanan Taman Ismail Marzuki. In *25 Tahun Pusat Kesenian Jakarta*. Yayasan Kesenian Jakarta.
- Nas, P. J. M. (1992). Jakarta, City Full Symbols: An Essay in Symbolic Ecology. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 7(2), 175–207. <https://www.jstor.org/stable/41056849>
- Majalah Budaja Djaja No. 122 Tahun XI*. (1978, July)
- Majalah Prisma No. 3 Tahun XIII*. (1984, March)
- Majalah Prisma No. 5 Tahun XVII*. (1988, May)
- Majalah Horison No. 11 Tahun XII*. (1977, November)
- Majalah Horison No. 6 Tahun XXXII*. (1998, June)
- Peursen, V. (1976). *Strategi Kebudayaan*. Penerbit Kanisius.
- Rinjani, N. F. (2020). Perubahan Peran Seniman dalam Dinamika Ruang Publik di Taman Ismail Marzuki (1968-2018). *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, 5(1), 1–15. <https://jurnal.unpad.ac.id/umbara/article/view/28268/13647>
- Rosidi, A. (1974). *Taman Ismail Marzuki*. Dewan Kesenian Jakarta Cipta.
- Rosidi, A. (2006). *Ali Sadikin dan Kesenian*. IKJ Press.
- Schuster, G., & Breña, M. O. (2015). The Concept of the Visible between Art and Politics. *Latin American Perspectives*, 42(1), 84–94. <http://www.jstor.org/stable/24573954>
- Sinar Harapan. (1995, November 11). 27 tahun TIM perlu pembenahan. *Sinar Harapan*.
- Supartono, A. (2000). *Lekra vs Manikebu: Perdebatan Kebudayaan Indonesia 1950-1965*. STF Driyarkara.
- Trianasari, R. M. (2019). *Peristiwa Desember Hitam 1974: Perlawanan Seniman Terhadap Kemapanan Seni*. Universitas Indonesia.
- Usman, A. *Wawancara Pribadi*. 13 Desember, 2023.
- Vickers, A. (1997). Malay Identity: Modernity, Invented Tradition and forms of Knowledge. *RIMA*, 31, 173–212. <https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/ielapa.980706728>
- Wie, T.K. (2007). Indonesia's Economic Performance under Soeharto's New Order. *Seoul Journal of Economics*. 20 (2), 263-281. <http://sje.ac.kr/xml/28419/28419.pdf>

Yusuf, N. F. (2023a). Lagu Darah Juang dalam Konteks Demonstrasi 1998. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 6(2), 159–170. <https://doi.org/10.17509/historia.v6i2.56582>

Yusuf, N. F. (2023b). Pasarsenen: Dari Pasar Menjadi Kawasan Elit. *Historia: Jurnal Ilmu Sejarah*, 6(1), 17–26. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JH/article/view/38909/12796>